

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja/Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) tahun 2021 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat lebih terencana, terpolos dan terpadu.

Mataram, Oktober 2020

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dra. T. Wismaningsih Drajadiah

Pembina Utama Muda

NIP. 19630328 198703 2 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	44
BAB V PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap SKPD wajib merumuskan rencana setrategis dengan mengacu pada RPJMD dan dengan mempertimbangkan kondisi dan isu strategis masing-masing wilayah. Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan, dan sebagai acuan dan pedoman penyusunan RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di Disnakertrans NTB. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan.

Rencana Kerja/Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Untuk mendapatkan keselarasan antara RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 yang mengacu kepada Rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan dokumen perencanaan

lainnya.

Untuk penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan berkesinambungan proses penyusunan perencanaan pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan, maka diperlukan RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan tahun ke lima RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

RENJA SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam doukumen RENSTRA Tahun 2019-2023.

RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 juga merupakan sebagai bahan untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, RKP Tahun 2020, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 dan dokumen lain yang terkait yang pada akhirnya menjadi muara penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang bersangkutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan penganggaran di tahun 2021, adapun tujuannya adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2021;
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020;
3. Menyiapkan bahan dan pedoman untuk penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021;
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan pelayanan publik dengan pola Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- BAB I Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- BAB II Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- BAB III Bab ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah
- BAB IV Bab ini berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.
- BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah menetapkan Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Gubernur NTB dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan sararan, indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Target dan Realisasi sasaran staregis, indikator kinerja

Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal	96,50 %	96,86 % *)
2	Menjaga Hubungan Industrial dan Iklim Ketenagakerjaan yang harmonis	Presentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial yang didaftarkan	85,00 %	19,17 % *)

Ket :

*) tabel 2.1. sasaran staregis, indikator kinerja berdasarkan revisi renstra 2019-2023

*) Realisasi Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal 96,86 persen, data sementara rilis BPS Prov. NTB Februari 2020

*) Realisasi Presentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial yang didaftarkan tahun 2020 19,17 persen (data sementara agustus 2020)

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2019			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	85	%													
	Pemberdayaan Lembaga Pelatihan	Jumlah lembaga yang dibina	1	Lembaga	220.191.300	1	39.635.100	1	31.293.400	1	31.293.400	100,00	100,00	2	70.928.500	200	32
	Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja keluar negeri	Jumlah orang	150	Orang	992.248.520	52	332.965.100	30	123.211.200	30	119.702.400	97,15	100,00	82	452.667.500	55	46
	Rekrutment dan seleksi pemagangan luar negeri (Jepang)	Jumlah orang	400	Orang	234.748.615	100	47.731.600	0	0	0	0	0,00	0	100	47.731.600	25	20
	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	Jumlah Dokumen hasil identifikasi	4	Dokumen	128.000.000	1	43.454.400	0	0	0	0	0,00	0	1	43.454.400	25	34
	Desiminasi asean skill competition (ASC).	Jumlah Orang	500	Orang	242.582.704	0	0	100	37.547.500	100	37.356.200	99,49	100,00	100	37.356.200	20	15

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2019			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=5+7	10=(9/4)*100								
	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (UPTD BLK Mataram)	Jumlah peralatan pendidikan dan keterampilan	140	Buah	1.576.271.055	388	1.180.369.400	50	721.000.000	50	716.641.000	99,40	100,00	438	1.897.010.400	313	120
	Pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja (UPTD BLK Mataram)	Jumlah orang yang dilatih	128	orang	910.000.000	256	966.833.800	0	0	0	0,00	0,00	256	966.833.800	200	106	
	Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (UPTD BLK Mataram)	Jumlah alumni siswa pelatihan kerja yang termonitor	25	Orang	181.000.000	1	29.126.600	5	25.000.000	5	24.956.000	99,82	100,00	6	54.082.600	24	30
	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan %	90	%													
	Penanganan pekerja migran indonesia bermasalah	Jumlah orang	13	Orang	2.641.794.497	2.923	540.441.500	2.700	298.300.900	2.045	298.248.400	99,98	75,74	4.968	838.689.900	39.118	32

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2019			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=5+7	10=(9/4)*100								
	Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	Jumlah orang	91	Orang	1.531.026.519	23.030	257.378.896	24.000	141.824.500	23.843	134.385.701	94,75	99,35	46.873	391.764.597	51.283	26
	Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing	Jumlah orang	560	Orang	415.000.001	102	47.681.800	300	48.074.000	93	48.034.000	99,92	31,00	195	95.715.800	35	23
	Padat Karya Produktif	Jumlah orang	296	Orang	648.000.000	900	1.375.141.644	0	0	0	0	0,00	0,00	900	1.375.141.644	304	212
	Informasi pasar kerja (Job Fair)	Jumlah orang	20	Orang	765.957.000	1.360	291.030.900	4.000	173.957.000	3.544	173.944.460	99,99	88,60	4.904	464.975.360	24.520	61
	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.	Jumlah orang	440	Orang	1.588.825.998	25	72.081.055	160	576.042.800	160	549.856.900	95,45	100,00	185	621.937.955	42	39
	Peluang kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN.	Jumlah orang	210	Orang	390.197.000	60	172.712.600	0	0	0	0	0,00	0,00	60	172.712.600	29	44
	Padat Karya Infrastruktur .	Jumlah orang	296	Orang	648.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Ex bagi Eks TKI /Migran.	Jumlah orang	180	Orang	300.000.000	20	48.135.985	0	0	0	0	0,00	0,00	20	48.135.985	11	16
	Pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia (BLKLN).	Jumlah calon PMI yang dilatih	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2019			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=5+7	10=(9/4)*100								
	Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.	Besaran sengketa pengusaha pekerja %	70	%						0,00		0	0				0
	Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.	Jumlah lembaga Tripartit	50	Kab/Kota	175.432.800	11	119.159.800	10	18.177.800	10	17.581.200	96,72	100,00	21	136.741.000	42	78
	Pemberdayaan ketenagakerjaan pada peringatan hari buruh internasional .	Jumlah orang	600	Orang	301.590.000	200	149.852.200	200	51.590.000	200	51.561.200	99,94	100,00	400	201.413.400	67	67
	Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah.	Dokumen UMP/UMK	54	Kab/Kota	335.322.700	10	99.828.800	10	46.697.700	10	46.548.700	99,68	100,00	20	146.377.500	37	44
	Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja di perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dibina	150	Perusahaan	277.964.400	0	0	10	31.454.500	10	31.325.500	99,59	100,00	10	31.325.500	7	11

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2019			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=5+7	10=(9/4)*100								
	Pembinaan lingkungan sosial dan pengujian kesehatan kerja upto Balai pengawasan pulau Lombok).	Jumlah orang	124	Orang	173.275.000	300	139.988.000	200	43.275.000	200	43.180.800	99,78	100,00	500	183.168.800	403	106
	Pembinaan lingkungan sosial dan pengujian kesehatan kerja (upto Balai pengawasan pulau Sumbawa).	Jumlah orang	1.300	Orang	169.590.775	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan.	Besaran pemeriksaan Perusahaan	95									0,00		0			
	Advokasi peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan	Jumlah perusahaan	75	Perusahaan	180.386.066	25	59.721.200	25	25.000.000	25	24.906.000	99,62	100,00	50	84.627.200	67	47
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat	Jumlah perusahaan	100	Perusahaan	189.925.755	25	99.906.600	25	43.520.900	25	43.404.400	99,73	100,00	50	143.311.000	50	75

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2019			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=5+7	10=(9/4)*100								
	Kerja.																
	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan.	Jumlah perusahaan	85	Perusahaan	231.416.066	20	54.023.700	20	36.761.420	20	36.609.420	99,59	100,00	40	90.633.120	47	39
	Temu teknis konsultasi penegakan hukum	Jumlah dokumen	25	Perusahaan	35.000.000	0	0	25	27.000.000	25	26.837.700	99,40	100,00	25	26.837.700	100	77
	Pendaftaran obyek keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan (UPTD Pengawasan Pulau Lombok).	Jumlah perusahaan	110	Perusahaaan	175.000.000	50	58.904.000	22	25.000.000	22	24.313.000	97,25	100,00	72	83.217.000	65	48

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2019			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=5+7	10=(9/4)*100								
	Pengawasan dan pemeriksaan norma kerja di perusahaan (UPTD Pengawasan Pulau Lombok).	Jumlah perusahaan	88	Perusahaan	140.000.000	50	52.047.500	22	25.000.000	22	24.782.000	99,13	100,00	72	76.829.500	82	55
	Penanganan kasus ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Pulau Lombok).	Jumlah Kasus	84	Kasus	139.198.384	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Pemeriksaan CPMI ketempat penampungan (UPTD Pengawasan Pulau Lombok).	Jumlah Orang Trip	18	OT	198.000.000	0	0	3	17.000.000	3	14.675.900	86,33	100,00	3	14.675.900	17	7
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Pulau Lombok).	Jumlah Orang Trip	111	OT	127.070.610	1	64.759.000	20	21.725.000	20	21.627.000	99,55	100,00	21	86.386.000	19	68

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2019			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=5+7	10=(9/4)*100								
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja (UPTD Pengawasan Pulau Sumbawa).	Jumlah Perusahaan	100	Perusahaan	135.000.000	20	26.319.000	20	32.000.000	20	23.005.000	71,89	100,00	40	49.324.000	40	37
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) (UPTD Pengawasan Pulau Sumbawa).	Jumlah Perusahaan	100	Perusahaan	126.500.000	30	25.300.000	20	30.300.000	20	20.970.500	69,21	100,00	50	46.270.500	50	37
	Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan pulau Sumbawa (UPTD Pengawasan Pulau	Jumlah Perusahaan	100	Perusahaaan	77.721.000	0	0	20	20.544.200	20	8.244.200	40,13	100,00	20	8.244.200	20	11

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2019			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=5+7	10=(9/4)*100								
	Sumbawa).																
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Pulau Sumbawa (UPTD Pengawasan Pulau Sumbawa).	Jumlah Perusahaan	100	Perusahaan	75.721.000	0	0	20	20.144.200	20	19.960.000	99,09	100,00	20	19.960.000	20	26
	Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Pulau Sumbawa).	Jumlah Kasus	5	Kasus	96.081.500	0	0	1	19.216.300	1	14.925.000	77,67	100,00	1	14.925.000	20	16
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Pulau	Jumlah Orang Trip	5	Kasus	176.991.500	0	0	1	17.398.300	1	14.198.300	81,61	100,00	1	14.198.300	20	8

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2019			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=5+7	10=(9/4)*100								
	Sumbawa)																
	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi.	Cakupan penempatan transmigrasi	80	%													
	Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi , Izin Prinsip pelepasan kawasan hutan(IPPKH) dan pengurusan Penetapan SK HPL.	Jumlah Dokumen hasil identifikasi	5	Dokumen	242.493.400	3	58.652.600	1	45.000.000	1	44.880.900	99,74	100,00	4	103.533.500	80	43
	Penyuluh dan seleksi calon Transmigrasi (Catrans)	Jumlah KK	100	KK	52.556.056	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD) dan pemindahan Catrans	Jumlah Dokumen	17	Dokumen	320.000.000	1	96.584.200	1	50.000.000	1	49.674.060	99,35	100,00	2	146.258.260	12	46
	Bimtek kewirausahaan	Jumlah Transmigrasi yang dibina	180	Orang	77.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2019			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=5+7	10=(9/4)*100								
	Bimtek pengolahan hasil pertanian	Jumlah Transmigran yang dibina	120	Orang	129.499.990	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Transmigran di UPT	Jumlah Transmigran yang dibina	60	Orang	62.500.000	0	0	60	50.900.000	60	48.700.100	95,68	100,00	60	48.700.100	100	78

Tabel 2.3.

Perkiraan Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2020			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	85	%											
	Pemberdayaan Pengelola Lembaga Pelatihan	Jumlah lembaga yang dibina	1	Lembaga	220.191.300	50	21.970.000	50	21.970.000	100,00	100,00	150	242.161.300	1	91
	Akkreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)	Jumlah orang	150	Orang	992.248.520	45	29.250.000	32	21.200.000	71,11	72,48	103	1.013.448.520	145	98
	Peningkatan kapasitas Calon Tenaga ke Luar Negeri	Jumlah orang	400	Orang	234.748.615	250	15.000.000	30	4.995.000	12,00	33,30	42	239.743.615	952	98
	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	Jumlah Dokumen hasil identifikasi	4	Dokumen	128.000.000	2	28.482.015	2	28.482.015	100,00	100,00	102	156.482.015	4	82
	Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (UPTD BLK Mataram)	Jumlah alumni siswa pelatihan kerja yang termonitor	25	Orang	181.000.000	150	27.275.900	0	0	0,00	0,00	0	181.000.000	0	100
	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan %	90	%											

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2020			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	Penanganan pekerja migran indonesia bermasalah	Jumlah orang	13	Orang	2.641.794.497	2.000	517.330.206	1.602	414.517.316	80,10	80,13	1.682	3.056.311.813	1	86
	Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	Jumlah orang	91	Orang	1.531.026.519	24.000	280.803.000	15.468	180.982.400	64,45	64,45	15.532	1.712.008.919	1	89
	Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing	Jumlah orang	560	Orang	415.000.001	50	2.499.900	50	2.499.900	100,00	100,00	150	417.499.901	373	99
	Informasi pasar kerja (Job Fair)	Jumlah orang	20	Orang	765.957.000	1.000	8.721.000	1.000	8.721.000	100,00	100,00	1.100	774.678.000	2	99
	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.	Jumlah orang	440	Orang	1.588.825.998	40	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0	1.588.825.998	0	100
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	Besaran sengketa pengusaha pekerja %	70	%										0	
	Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.	Jumlah lembaga Tripartit	50	Kab/Kota	175.432.800	10	24.209.800	0	0	0,00	0,00	0	175.432.800	0	100
	Pengembangan Sistem Pungutan Daerah.	Dokumen UMP/UMK	54	Kab/Kota	335.322.700	11	52.400.000	0	0	0,00	0,00	0	335.322.700	0	100

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2020			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja di perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dibina	150	Perusahaan	277.964.400	10	20.000.000	4	6.520.000	40,00	32,60	44	284.484.400	341	98
	Pembinaan lingkungan sosial dan pengujian kesehatan kerja upto Balai pengawasan pulau Lombok).	Jumlah orang	124	Orang	173.275.000	300	78.444.750	110	28.500.000	36,67	36,33	147	201.775.000	85	86
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan.	Besaran pemeriksaan Perusahaan	95												
	Advokasi peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan	Jumlah perusahaan	75	Perusahaan	180.386.066	10	32.122.000	0	0	0,00	0,00	0	180.386.066	0	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja.	Jumlah perusahaan	100	Perusahaan	189.925.755	75	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0	189.925.755	0	100
	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan.	Jumlah perusahaan	85	Perusahaan	231.416.066	15	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0	231.416.066	0	100

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2020			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	Temu teknis konsultasi penegakan hukum	Jumlah dokumen	25	Perusahaan	35.000.000	10	24.980.000	2	4.980.000	20,00	19,94	22	39.980.000	114	88
	Pendaatan obyek keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan (UPTD Pengawasan Pulau Lombok).	Jumlah perusahaan	110	Perusahaan	175.000.000	22	8.330.000	10	4.480.000	45,45	53,78	55	179.480.000	198	98
	Pengawasan dan pemeriksaan norma kerja di perusahaan (UPTD Pengawasan Pulau Lombok).	Jumlah perusahaan	88	Perusahaan	140.000.000	22	9.158.000	10	5.460.000	45,45	59,62	55	145.460.000	159	96
	Penanganan kasus ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Pulau Lombok).	Jumlah Kasus	84	Kasus	139.198.384	2	9.970.000	2	5.360.000	100,00	53,76	102	144.558.384	82	96
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Pulau Lombok).	Jumlah Orang Trip	111	OT	127.070.610	10	5.000.000	4	2.250.000	40,00	45,00	44	129.320.610	252	98
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (UPTD Pengawasan Pulau Sumbawa).	Jumlah Perusahaan	100	Perusahaan	77.721.000	20	32.650.000	10	16.190.000	50,00	49,59	60	93.911.000	167	83

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2020			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Pulau Sumbawa (UPTD Pengawasan Pulau Sumbawa).	Jumlah Perusahaan	100	Perusahaan	75.721.000	20	31.907.677	0	25.050.000	0,00	78,51	0	100.771.000	0	75
	Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Pulau Sumbawa).	Jumlah Kasus	5	Kasus	96.081.500	1	14.550.000	1	12.710.000	100,00	87,35	101	108.791.500	5	88
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan (UPTD Pengawasan Pulau Sumbawa)	Jumlah Orang Trip	5	Kasus	176.991.500	4	9.277.000	1	2.854.000	25,00	30,76	26	179.845.500	19	98
	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi.	Cakupan penempatan transmigrasi	80	%											
	Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi, Izin Prinsip pelepasan kawasan hutan(IPPKH) dan pengurusan Penertiban SK HPL.	Jumlah Dokumen hasil identifikasi	5	Dokumen	242.493.400	1	6.020.200	1	6.000.000	100,00	99,66	101	248.493.400	5	98
	Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD) dan pemindahan Catrans	Jumlah Dokumen	17	Dokumen	320.000.000	4	15.000.000	2	7.950.000	50,00	53,00	52	327.950.000	33	98

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode RPJMD)			Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2020			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Transmigran di UPT	Jumlah Transmigran yang dibina	60	Orang	62.500.000	60	16.530.000	40	7.800.000	66,67	47,19	107	70.300.000	56	89

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2023, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan organisasi yang jelas dan terukur. Adapun strategi dan arah kebijakan organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.4.

Strategi Dan Arah Kebijakan

Visi : Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang			
Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Meningkatnya a Kesempatan Kesempatan Kerja Masyarakat	1.1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam dan luar negeri 1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	1.1.1. Revitalisasi BLK melalui Peningkatan Pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada klaster kompetensi bagi tenaga kerja dalam dan luar serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan 1.1.2. Peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan dalam dan luar negeri 1.1.3. Peningkatan sertifikasi tenaga kerja 1.1.4. Pembinaan dan akreditasi lembaga latihan 1.2.1. Peningkatan akses angkatan kerja kepada dunia kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja/ Informasi pasar kerja Lokal 1.2.2. Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja

			AKAD
			1.2.3. Fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
			1.2.4. Fasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja
	1.3. Meningkatkan Pelayanan penyelenggaraan transmigrasi	1.3.1. Peningkatan kerjasama antar daerah 1.3.2. Peningkatan kualitas calon transmigran	
2. Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial demi iklim ketenagakerjaan yang harmonis	2.1. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan	2.1.1. Peningkatan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan mediasi 2.1.2. Peningkatan kapasitas Serikat Pekerja dan Pengusaha melalui pelatihan, sosialisasi dan penguatan kelembagaan 2.1.3. Peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui penerapan sistem pengupahan yang adil dan program perlindungan sosial bagi pekerja	
	2.2. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	2.2.1. Peningkatkan Pembinaan, pelayanan dan penerapan Norma Kerja 2.2.2. Peningkatkan Pembinaan, pelayanan dan penerapan Norma K3	

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTB 2013 – 2018, Indikator Kinerja Daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB adalah **Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** yang diikutiarkan semakin menurun.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat sehingga diharapkan terjadi penurunan tingkat pengangguran.

Pada tahun 2020, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat sebesar **3,35 persen**, dan realisasi TPT sebesar **3,14 persen (realisasi BPS Prov. NTB, data sementara Februari 2020)**.

Tabel 2.5.

Tabel capaian RPJMD Disnakertrans Prov. NTB 2019-2023

Indikator	Sat.	Kondisi Awal RPJMD 2018	2019		2020		2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,72	3,39	3,42	3,35	3,14)*	3,30	3,19	3,17	3,17
Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	80	80	85	*)	90	95	100	100

Ket :

*) Tingkat Pengangguran Terbuka kondisi Februari 2020 (data sementara)

*) Cakupan Penempatan Transmigran di tahun 2020, tidak dilakukan penempatan transmigran akibat pandemi covid-19

Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang sekitar 3,07 ribu orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 3,14 persen pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk SMA Kejuruan tertinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 6,97 persen.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 2.491,25 ribu orang, naik sekitar 1,86 ribu orang dibanding Februari 2019. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kondisi Februari 2019 sebesar 69,62 persen, turun menjadi 68,68 persen pada Februari 2020.

Penduduk yang bekerja sebanyak 2.413,03 ribu orang, bertambah sekitar 4,93 ribu orang dari Februari 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase

penduduk bekerja terutama pada Konstruksi (0,43 persen poin), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,29 persen poin), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,26 persen poin), dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,12 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penduduk bekerja utamanya pada Jasa Pendidikan (0,56 persen poin), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,45 persen poin), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,20 persen poin). Berikut tabel kondisi ketenagakerjaan di NTB kondisi bulan Februari 2018 – Februari 2020.

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja telah dilakukan berbagai upaya dari pihak pemerintah, swasta dan berbagai elemen masyarakat.

Peran pemerintah dan swasta dalam penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dilakukan melalui program dan berbagai kegiatan pelatihan berbasis kompetensi baik yang dilaksanakan oleh BLK, LLK maupun LPK Swasta.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan program-program kegiatan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB
2. Tingkat persaingan Kompetensi Tenaga Kerja lokal dengan tenaga kerja dari luar daerah yang semakin tinggi
3. Kurangnya kapasitas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh BLK/LLK untuk melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri.
4. Penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan, dan pemberdayaan tenaga kerja yang perlu ditingkatkan.
5. Masih rendahnya peran perangkat hubungan industrial dan sistem pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim ketenagakerjaan.
6. Perlunya penyelenggaraan transmigrasi yang lebih terstruktur dan berkesinambungan demi tercapainya pembangunan yang merata.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Tabel 2.5.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.		
				Sat.	Target					Sat.	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Besaran Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	22	2.742.800.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Besaran Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	22	2.742.800.000		
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	150	452.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	150	452.000.000		
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	orang	150	376.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	orang	150	376.000.000		

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.		
				Sat.	Target					Sat.	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan pemagangan	dokumen	2	76.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan pemagangan	dokumen	2	76.000.000		
1.2	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Provinsi NTB	Jumlah LPK Yang Diakreditasi	lembaga	35	102.300.000	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Provinsi NTB	Jumlah LPK Yang Diakreditasi	lembaga	35	102.300.000		
	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Provinsi NTB	Jumlah LPK yang di Akreditasi	lembaga	35	102.300.000	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Provinsi NTB	Jumlah LPK yang di Akreditasi	lembaga	35	102.300.000		
1.3	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.	orang	384	2.140.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.	orang	384	2.140.000.000		

NO.	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting	
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.				
				Sat.	Target					Sat.	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLK]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	384	2.140.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLK]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	384	2.140.000.000				
1.4	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Peserta Yang Dimonev Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Dokumen Monevi Pasca Pelatihan.	kab/kota	384	48.500.000	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Peserta Yang Dimonev Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Dokumen Monevi Pasca Pelatihan.	kab/kota	384	48.500.000				
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja [BLK]	Provinsi NTB	Jumlah Peserta Yang Dimonev Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Dokumen Monevi Pasca Pelatihan.	kab/kota	384	48.500.000	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja [BLK]	Provinsi NTB	Jumlah Peserta Yang Dimonev Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Dokumen Monevi Pasca Pelatihan.	kab/kota	384	48.500.000				
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	orang	40.000	1.713.000.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	orang	40.000	1.713.000.000				

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.		
				Sat.	Target					Sat.	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.1	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	orang	30	26.000.000	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	orang	30	26.000.000		
	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	orang	30	26.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	orang	30	26.000.000		
2.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	orang	6.000	300.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	orang	6.000	300.000.000		
	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	orang	6.000	300.000.000	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	orang	6.000	300.000.000		
2.3	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	orang	24.453	1.227.000.000	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	orang	24.453	1.227.000.000		

NO.	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.			
				Sat.	Target					Sat.	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah PMI Bermasalah Yang Ditangani	orang	2.700	726.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah PMI Bermasalah Yang Ditangani	orang	2.700	726.000.000			
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah PMI Ke Luar Negeri Yang Dilayani Di LTSA	orang	21.500	185.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah PMI Ke Luar Negeri Yang Dilayani Di LTSA	orang	21.500	185.000.000			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	orang	60	316.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	orang	60	316.000.000			
2.4	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah	Provinsi NTB	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani.	orang	60	160.000.000	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah	Provinsi NTB	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani.	orang	60	160.000.000			

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.		
				Sat.	Target					Sat.	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Provinsi						Provinsi							
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani	orang	60	160.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani	orang	60	160.000.000		
3	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Cakupan Kawasan Baru Transmigrasi	dokumen	1	160.000.000	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Cakupan Kawasan Baru Transmigrasi	dokumen	1	160.000.000		
3.1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen NKSAD.	dokumen	1	160.000.000	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen NKSAD.	dokumen	1	160.000.000		
	Sub Kegiatan Advokasi Dan Musyawarah Penetapan Kawasan [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen NKSAD.	dokumen	1	160.000.000	Sub Kegiatan Advokasi Dan Musyawarah Penetapan Kawasan [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen NKSAD.	dokumen	1	160.000.000		

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.		
				Sat.	Target					Sat.	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Cakupan Penempatan Transmigrasi	orang	90	139.000.000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Cakupan Penempatan Transmigrasi	orang	90	139.000.000		
4.1	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran Yang Diberdayakan Di UPT Bina.	orang	25	139.000.000	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran Yang Diberdayakan Di UPT Bina.	orang	25	139.000.000		
	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman. [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Pertanahan Transmigrasi SKHPL Dan IPPKH	kawasan	1	63.000.000	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman. [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Pertanahan Transmigrasi SKHPL Dan IPPKH	kawasan	1	63.000.000		
	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman. [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran Peserta Bimbingan Teknis.	orang	25	76.000.000	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman. [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Transmigran Peserta Bimbingan Teknis.	orang	25	76.000.000		

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.		
				Sat.	Target					Sat.	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Program Hubungan Industrial	Provinsi NTB	Besaran Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	perusahaan	200	337.200.000	Program Hubungan Industrial	Provinsi NTB	Besaran Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	perusahaan	200	337.200.000		
5.1	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	perusahaan	100	211.200.000	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	perusahaan	100	211.200.000		

NO.	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.			
				Sat.	Target					Sat.	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Dalam (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Hubungan Industrial Dan Jamsosteknya	perusahaan	100	125.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Dalam (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Hubungan Industrial Dan Jamsosteknya	perusahaan	100	125.000.000			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian Kerjasama Tripartit	perusahaan	10	86.200.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian Kerjasama Tripartit	perusahaan	10	86.200.000			
5.2	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota (UMSK)	Provinsi NTB	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Lokasi	11	126.000.000	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota (UMSK)	Provinsi NTB	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Lokasi	11	126.000.000			

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.		
				Sat.	Target					Sat.	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah UMP / UKM Yang Disahkan	Lokasi	11	126.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah UMP / UKM Yang Disahkan	Lokasi	11	126.000.000		
6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	Cakupan perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	perusahaan	430	987.870.000	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	Cakupan perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	perusahaan	430	987.870.000		
6.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	perusahaan	430	987.870.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	perusahaan	430	987.870.000		
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	perusahaan	35	75.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	perusahaan	35	75.000.000		

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.		
				Sat.	Target					Sat.	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	perusahaan	35	82.600.000	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	perusahaan	35	82.600.000		
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok	perusahaan	35	82.600.000	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok	perusahaan	35	82.600.000		
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang dibina pelaksanaan norma ketenagakerjaan	perusahaan	35	79.250.000	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang dibina pelaksanaan norma ketenagakerjaan	perusahaan	35	79.250.000		
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Ditangani Di Pulau Lombok	perusahaan	35	78.500.000	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Ditangani Di Pulau Lombok	perusahaan	35	78.500.000		
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Ditangani Di Pulau Sumbawa	perusahaan	35	78.500.000	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Ditangani Di Pulau Sumbawa	perusahaan	35	78.500.000		

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting	
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.			
				Sat.	Target					Sat.	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya	perusahaan	35	86.420.000	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya	perusahaan	35	86.420.000			
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa	perusahaan	35	75.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa	perusahaan	35	75.000.000			
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok	perusahaan	150	350.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok	perusahaan	150	350.000.000			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Tabel 2.6.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Program	Indikator	Lokasi	Target	Catatan
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja dalam negeri Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	BLK DLN	20 Paket	Perlu Tambahan anggaran Khusus Revitalisasi BLK seperti Revitaliasi sarana prasarana pelatihan keterampilan, revitalisasi tenaga pelatih (instruktur) revitalisasi kurikulum pelatihan, program magang di perusahaan, melakukan training need analysis (TNA) agar jenis kejuruan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dalam rangka mendukung KEK mandalika dan event MotoGP di tahun 2021
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja luar negeri Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	BLK DLN	4 Paket	Dengan dibentuknya Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri, perlu didukung pelatihan berbasis kompetensi bagi CPMI yang akan ditempatkan ditahun 2021 untruk jenis jabatan pengasuh bayi dan pengasuh lansia
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Sarana dan Prasarana paltihan yang dipenuhi	BLK DLN	5 Paket	Dalam rangka mendukung pelatihan berbasis kompetensi bagi CPMI perlu pengadaan sarana dan prasarana pelatihan
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran tenaga kerja yang diawasi	Lombok Utara	1 Kegiatan	Penanganan TKA di 3 Gili perlu meningkatkan kinerja fungsional pegawai pengawas ketenagakerjaan
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan	Jumlah PMI Bermasalah Yang Ditangani	Se- NTB	1 Kegiatan	Penanganan TPPO perlu koordinasi terpadu dengan BP3TKI, dan Dinsos untuk

Program	Indikator	Lokasi	Target	Catatan
1	2	3	4	5
Kerja				menanganinya
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	Kab. Lombok Timur dan Lombok Tengah	2 paket	Dalam rangka meningkatkan stimulus ekonomi perlu dilakukan pemberdayaan PMI purna di bidang kewirausahaan
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	Kab. Sumbawa dan Kota Bima	2 paket	Dalam rangka menurunkan angka pengangguran di NTB perlu dilakukan kegiatan bursa kerja

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 adalah: **Tercapainya Penurunan Pengangguran Terbuka** dengan indikator persentase penurunan pengangguran terbuka.

Persentase pengangguran terbuka dapat diketahui melalui perbandingan : Jumlah Pengangguran Terbuka dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja dikali 100 persen

3.2. Sasaran

a. Meningkatnya Kesempatan Kesempatan Kerja Masyarakat.

Angka penurunan atau peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat diketahui melalui perhitungan: **Jumlah Penyerapan tenaga kerja formal ditambah jumlah penyerapan tenaga kerja informal dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja dikali 100 %.**

b. Menjaga Hubungan Industrial dan iklim ketenagakerjaan yang harmonis dengan indikator Persentase angka perselisihan atau kasus Hubungan Industrial antara Pekerja dan Pemberi kerja yang didaftarkan.

Angka penurunan atau peningkatan angka perselihan hubungan industrial : **Jumlah kasus HI pada tahun n (tahun terlapor) dikurangi jumlah kasus didaftarkan pada tahun baseline (2019) dibagi jumlah kasus pada tahun baseline (2019) dikali 100%.**

*Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Formulasi
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tercapainya Penurunan		Persentase penurunan tingkat penganggu	3,42	3,35	3,30	3,19	3,17	$\frac{\sum \text{Pengangguran Terbuka}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Formulasi
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Pengangguran Terbuka		ran terbuka						
	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Percentase penyerapan tenaga kerja formal dan informal	96,58	96,60	96,62	96,64	96,66	$\frac{\sum \text{Penyerapan T.K Formal} + \sum \text{Penyerapan T.K Informal}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$
	Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial demi iklim ketenagakerjaan yang harmonis	Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial demi iklim ketenagakerjaan yang harmonis	Percentase penurunan angka perselisihan atau kasus Hubungan Industrial yang didaftarkan	90,00	85,00	80,00	75,00	70,00	$\frac{\sum \text{Kasus HI (Tahun } n) }{\sum \text{Kasus HI (tahun baseline, 2019)}} \times 100 \%$

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk menghadapi tantangan di bidang ketenagakerjaan ini, pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan menetapkan 6 lokus program atau kebijakan yang meliputi :

1. Penciptaan lapangan kerja baru yang targetnya periode 2015-2019 mencapai 10 juta melalui program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan lewat informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri. Sedangkan untuk perluasan kesempatan kerja digulirkan melalui padat karya, wirausaha baru, tenaga kerja mandiri dan inkunasi bisnis.
2. Membangun Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelaksanaan program prlatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, sertifikasi, pemagangan dan program koordinasi lintas sector pelatihan vokasi nasional.
3. Perlindungan buruh migran Indonesia melalui program fasilitasi buruh migran sekaligus bentuk perlindungannya.
4. Jaminan sosial untuk tenaga kerja melalui kepesertaan Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
5. Pengawasan Ketenagakerjaan dengan menyasar perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya dan sector konstruksi.
6. Revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan penekanan pada isu keseimbangan beban antara perusahaan dan pekerja.

Sedangkan pada bidang ketransmigrasi, focus pemerintah pada penempatan transmigrasi dan pembangunan kawasan transmigrasi dalam rangka mewujudkan desa mandiri.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi referensi dalam pembangunan sector ketenagakerjaan dan ketransmigrasi di provinsi NTB melalui Program/Kegiatan unggulan untuk mewujudkan Visi/Misi pemerintah Provinsi NTB 2019-2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023, dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah “**Membangun Nusa Tenggara Barat yang GEMILANG**”.

Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci "**NTB GEMILANG**" yang bermakna :

1. Suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
2. Suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.
3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur.

Disnakertrans NTB dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengemban makna nomor 1 dari visi kepala dan wakil kepala daerah yaitu suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Sehingga Disnakertrans NTB akan berperan besar dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat khususnya pekerja atau kaum buruh, dan para transmigran agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak dengan terus meningkatkan kompetensi dan kemandirian mereka.

Dalam rangka pencapaian visinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menetapkan 6 [enam] misi yaitu :

1. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;
2. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
3. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

6. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan;

Memperhatikan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan, dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pelaksanaan satu misi saja yaitu :

Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi; untuk urusan wajib non pelayanan dasar ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian.

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi melalui peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dapat dicapai apabila sumber-sumber daya yang daerah miliki dapat dimaksimalkan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat potensi yang dimanfaatkan belum optimal. Salah satunya adalah terdapatnya Kawasan Ekonomi Khusus di daerah Mandalika dan akan digelarnya event moto GP dimana hal tersebut diyakini mampu memberikan multiplier effects terhadap pembangunan daerah. Begitu halnya dengan sektor pertanian dimana NTB merupakan salah satu daerah pengekspor hasil-hasil pertanian ke daerah-daerah atau negara-negara lain. Namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam pencapaian visi misi tersebut antara lain kurangnya tenaga kerja lokal yang mampu bersaing dengan tenaga kerja luar mengingat kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kompetensi yang kita siapkan. Selanjutnya, kurangnya pengembangan dan pengetahuan tentang teknologi yang mutakhir dalam pengembangan sektor-sektor terkait padahal penggunaan teknologi merupakan suatu keharusan untuk mengembangkan iklim perindustrian di NTB. Ditambah lagi dengan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka yang mengindikasikan masih kurangnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dari perspektif ekonomi.

Tabel 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan
Prakiraan Maju Tahun 2022

Indikator	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Sat.	Rencana Pendanaan			
				2021		2022	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Indeks Pelayanan Publik			Indeks	85,00		87,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Lakip OPD	Indeks	85,00	19.524.233	87,00	22.004.320
	Kegiatan Administrasi Umum	Laporan Administrasi Umum	Dokumen	1	3.005.468	1	3.451.902
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar (Induk)	Surat	139	1.050	139	1.208
		Jumlah Surat Keluar (BLK DLN)	Surat	146	1.250	146	1.438
		Jumlah Surat Keluar (BPKPL)	Surat	115	675	115	776
		Jumlah Surat Keluar (BPKPS)	Surat	96	1.938	96	2.228
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening (Induk)	Rekening	4	297.977	4	338.288
		Jumlah Rekening (BLK DLN)	Rekening	6	175.000	6	201.250
		Jumlah Rekening (BPKPL)	Rekening	3	37.500	3	43.125
		Jumlah Rekening (BPKPS)	Rekening	3	25.000	3	28.750
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa <u>pemeliharaan</u> dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan (Induk)	Unit	11	65.262	11	75.051
		Jumlah Kendaraan (BLK DLN)	Unit	5	41.500	5	47.725
		Jumlah Kendaraan (BPKPS)	Unit	3	24.338	3	27.989
		Jumlah Kendaraan (BPKPL)	Unit	4	26.252	4	30.190
	Sub. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan (Induk)	Orang	8	84.000	8	96.600
		Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan (BLK DLN)	Orang	4	62.876	4	72.307
		Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan (BPKPL)	Orang	3	32.138	3	36.959
		Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan (BPKPS)	Orang	2	19.740	2	22.701
	Sub. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan (Induk)	Orang	22	583.535	22	671.065

Indikator	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Sat.	Rencana Pendanaan			
				2021		2022	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Sub. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan (BLK DLN)	Orang	13	349.651	13	402.099	
	Jumlah Tenaga Kebersihan (BPKPL)	Orang	6	149.414	6	171.826	
	Jumlah Tenaga Kebersihan (BPKPS)	Orang	3	100.823	3	115.946	
	Sub. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK (Induk)	Jenis	30	10.500	30	12.075
	Jumlah Jenis ATK (BLK DLN)	Jenis	15	5.000	15	5.750	
	Jumlah Jenis ATK (BPKPL)	Jenis	10	5.625	10	6.469	
	Jumlah Jenis ATK (BPKPS)	Jenis	18	5.574	18	6.410	
	Sub. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan (Induk)	Eksemplar	7	20.908	7	24.044
	Jumlah Cetak dan Penggandaan (BLK DLN)	Eksemplar	5	4.017	5	4.620	
	Jumlah Cetak dan Penggandaan (BPKPL)	Eksampler	1	3.500	1	4.025	
Sub. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Cetak dan Penggandaan (BPKPS)	Eksampler	3	4.063	3	4.672	
	Sub. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Instalasi Listrik (Induk)	Jenis	11	5.250	11	6.038
	Jumlah Instalasi Listrik (BLK DLN)	Jenis	25	6.000	25	6.900	
	Jumlah Instalasi Listrik BPKPL)	Jenis	5	750	5	863	
	Sub. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar (Induk)	Eksemplar	7	13.125	7	15.094
Sub. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah eksemplar (BLK DLN)	Eksemplar	6	3.600	6	4.140	
	Jumlah eksemplar (BPKPL)	Eksemplar	6	720	6	828	
	Jumlah eksemplar (BPKPS)	Eksemplar	1	1.224	1	1.407	
	Sub. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Orang (Induk)	Orang	263	15.750	263	18.113
	Jumlah Orang (BLK DLN)	Orang	250	12.500	250	14.375	
	Jumlah Orang BPKPL	Orang	15	3.000	15	3.450	
	Jumlah Orang (BPKPS)	Orang	200	5.000	200	5.750	

Indikator	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Sat.	Rencana Pendanaan			
				2021		2022	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Sub. Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Sub. Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat (Induk)	Orang/tahun	15	136.165	15	156.590
		Jumlah Rapat (BLK DLN)	Orang/tahun	5	24.500	5	28.175
		Jumlah Rapat (BPKPL)	Orang/tahun	2	26.250	2	30.188
		Jumlah Rapat rip (BPKPS)	Orang/tahun	4	29.640	4	34.085
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan (Induk)	Laporan	10	88.649	10	101.946
		Jumlah Laporan (BLK DLN)	Laporan	8	19.000	8	21.850
		Jumlah Laporan (BPKPL)	Laporan	4	22.500	4	25.875
	Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan (BPKPS)	Laporan	7	30.554	7	35.137
		Jumlah Kendaraan (Induk)	Unit	0	0	0	0
		Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor (Induk)	Unit	3	66.820	3	76.843
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor (BLK DLN)	Jenis	3	70.000	3	80.500
		Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor (BPKPS)	Jenis	2	2.028	2	2.332
		Jumlah Gedung kantor (Induk)	Gedung	1	41.250	1	47.438
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor (BLK DLN)	Gedung	1	26.500	1	30.475
		Jumlah Gedung kantor (BPKPS)	Gedung	1	7.500	1	8.625
		Jumlah Kendaraan (Induk)	Unit	11	72.000	11	82.800
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Induk)	Jenis	11	30.250	11	34.788

Indikator	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Sat.	Rencana Pendanaan			
				2021		2022	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Sub. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (BLK DLN)	Jenis	23	43.171	23	49.646
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (BPKPL)	Jenis	3	10.000	3	11.500
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (BPKPS)	Jenis	2	5.000	2	5.750
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Rumah Gedung yang direhabilitasi (Induk)	Gedung	0	0	0	0
		Jumlah Rumah Gedung yang direhabilitasi (BLK DLN)	Gedung				0
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD (Induk)	Laporan	1	18.335	1	21.085
		Jumlah BMD (BLK DLN)	Laporan	1	11.918	1	13.705
		Jumlah BMD (BPKPL)	Laporan	1	5.800	1	6.670
		Jumlah BMD (BPKPS)	Laporan	1	11.618	1	13.360
	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	Orang	100	27.275	100	30.003
	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang di diklat Formal (Induk)	Orang	6	12.000	6	13.200
		Jumlah ASN yang di diklat Formal (BLK DLN)	Orang	5	15.275	5	16.803
	Kegiatan Administrasi Keuangan	Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen	6	16.270.820	6	18.279.678
	Sub.Kegiatan Gaji dan tunjangan PNS	Gaji dan tunjangan PNS	Orang	215	16.237.115	215	18.242.603
	Sub. Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan (Induk)	Dokumen	2	12.000	2	13.200
		Jumlah Laporan (BPKPS)	Dokumen	1	3.861	1	4.247
	Sub. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan (Induk)	Laporan	1	10.625	1	11.688
		Jumlah Laporan (BLK DLN)	Laporan	1	5.250	1	5.775
		Jumlah Laporan (BPKPS)	Laporan	1	1.969	1	2.165

Indikator	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Sat.	Rencana Pendanaan			
				2021		2022	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen	21	220.671	21	242.738	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (Induk)	Dokumen	6	22.000	6	24.200
		Jumlah Dokumen (BLK DLN)	Dokumen	4	14.355	4	15.790
		Jumlah Dokumen (BPKPL)	Dokumen	4	4.500	4	4.950
		Jumlah Dokumen (BPKPS)	Dokumen	4	6.816	4	7.498
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen	1	26.000	1	28.600
	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang	Orang	70	49.000	70	53.900
	Sub. Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Orang	Org	50	98.000	50	107.800
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga	dokumen	2	265.500	2	286.983
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	dokumen	2	265.500	2	286.983
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	Dokumen	1	180.000	1	183.483
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang di hasilkan	Dokumen	1	85.500	1	103.500
Persentase penyerapan tenaga kerja formal dan informal			%	96,62		96,64	

Indikator	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Sat.	Rencana Pendanaan			
				2021		2022	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	22	1.317.000	23	1.929.062
	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	150	172.000	300	422.000
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Orang	150	147.000	300	347.000
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS]	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan pemagangan	Dokumen	2	25.000	2	75.000
	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Diakreditasi	Lembaga	20	75.000	40	150.000
	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Jumlah LPK yang di Akreditasi	LPK	20	75.000	40	150.000
	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.	Orang	192	1.045.000	240	1.302.000

Indikator	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Sat.	Rencana Pendanaan			
				2021		2022	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLK DLN]	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	192	1.045.000	240	1.302.000
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Yang Dimonev Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Dokumen Monevi Pasca Pelatihan.	Orang	192	25.000	240	55.062
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja [BLK DLN]	Jumlah Peserta Yang Dimonev Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Dokumen Monevi Pasca Pelatihan.	Orang	192	25.000	240	55.062
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	orang	40.000	1.357.000	45.000	1.466.802
	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	Orang	30	20.000	30	25.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	Orang	30	20.000	30	25.000
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	Orang	4.000	250.000	4.000	250.000
	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	Orang	4.000	250.000	4.000	250.000
	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	Orang	24.453	1.022.000	25.953	1.126.802

Indikator	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Sat.	Rencana Pendanaan			
				2021		2022	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia [BID. PENEMPATAN]	Jumlah PMI Bermasalah Yang Ditangani	Orang	2.700	556.000	2.800	660.802
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran [BID. PENEMPATAN]	Jumlah PMI Ke Luar Negeri Yang Dilayani Di LTSA	Orang	21.500	150.000	21.500	150.000
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	Orang	60	316.000	60	316.000
	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani.	Orang	60	65.000	60	65.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani	Orang	60	65.000	60	65.000
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Kawasan Baru Transmigrasi	lokasi	1	20.000	1	20.000
	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen NKSAD.	Dokumen	1	20.000	1	20.000
	Sub Kegiatan Advokasi Dan Musyawarah Penetapan Kawasan [BID. TRANS]	Jumlah Dokumen NKSAD.	Dokumen	1	20.000	1	20.000

Indikator	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Sat.	Rencana Pendanaan			
				2021		2022	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigrasi	%	90	30.000	95	30.000
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan	Jumlah Transmigran Yang Diberdayakan Di UPT Bina.	orang	25	30.000	25	30.000
	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman. [BID. TRANS]	Jumlah Dokumen Pertanahan Transmigrasi SKHPL Dan IPPKH	Dokumen	1	15.000	1	15.000
	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman. [BID. TRANS]	Jumlah Transmigran Peserta Bimbingan Teknis.	Orang	25	15.000	25	15.000
Percentase penurunan angka perselisihan atau kasus Hubungan Industrial yang didaftarkan			%	80,00		75,00	
	Program Hubungan Industrial	Besaran Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	Perusahaan	200	236.000	225	255.096
	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	100	160.000	120	179.096

Indikator	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Sat.	Rencana Pendanaan			
				2021		2022	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Hubungan Industrial Dan Jamsosteknya	Perusahaan	100	100.000	120	119.096
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian KerjasamaTripartit	Lembaga	10	60.000	10	60.000
	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	76.000	11	76.000
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK [BID. HI]	Jumlah UMP / UKM Yang Disahkan	Dokumen	11	76.000	11	76.000
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	Perusahaan	310	324.500	310	350.759
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	310	324.500	310	350.759
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	20	22.500	20	26.000

Indikator	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Sat.	Rencana Pendanaan			
				2021		2022	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	20	22.500	20	26.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusahaan	20	22.500	20	26.000
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang dibina pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Perusahaan	20	22.500	20	26.000
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Ditangani Di Pulau Lombok	Perusahaan	20	22.500	20	25.759
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Ditangani Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	20	22.000	20	26.000
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya	Perusahaan	20	20.000	20	22.000
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	20	20.000	20	23.000
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusahaan	150	150.000	150	150.000
					23.074.233		26.343.022

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Disnakertrans Prov. NTB ini merupakan tindak lanjut dari perubahan Renstra Disnakertrans Prov. NTB (2019-2023). Hal tersebut mutlak dilakukan guna menghadapi tantangan dan permasalahan yang berkembang saat ini seperti terjadinya Pandemi Covid 19, disamping juga untuk menyesuaikan rencana strategis SKPD dengan regulasi yang terbaru.

Tujuan utama dari Penyusunan Renja Disnakertrans Prov. NTB tahun 2021 adalah sebagai dokumen acuan tahunan dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan. Beberapa isu-isu strategis yang menjadi tantangan Disnakertrans Prov. NTB kedepan antara lain: Masih tingginya pengangguran terbuka, jumlah PHK yang meningkat, persaingan tenaga kerja lokal dengan luar daerah dan luar negeri yang semakin meningkat, kapasitas BLK/LLK yang masih rendah, peran perangkat HI yang masih minim, dan penempatan transmigran yang masih belum optimal.

Kinerja Disnakertrans Prov. NTB yang terkait dengan kinerja kepala daerah dalam RPJMD ada dua yaitu tingkat pengangguran terbuka dan cakupan penempatan transmigrasi. Jika melihat indikator kinerja, Disnakertrans bisa dikatakan berhasil dalam mencapai target. Walaupun begitu, tantangan kedepan jauh lebih berat karena akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak di semua sektor.